



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN PT No. 451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014*

***Unfair Treatment China terhadap Perusahaan Multinasional  
Amerika Serikat dalam Masa U.S.-China Strategic and Economic  
Dialogue Tahun 2012 (2011-2014)***

Skripsi

Oleh:

Bunga Putri Nauli

2014330125

Bandung

2018



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN PT No. 451/SK/BAN-PT/AKRED/S/XI/2014*

***Unfair Treatment China terhadap Perusahaan Multinasional Amerika  
Serikat dalam Masa U.S.-China Strategic and Economic Dialogue  
Tahun 2012 (2011-2014)***

Skripsi

Oleh

Bunga Putri Nauli

2014330125

Pembimbing

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



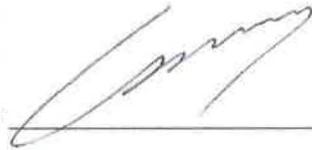
**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Bunga Putri Nauli  
Nomor Pokok : 2014330125  
Judul : *Unfair Treatment China terhadap Perusahaan Multinasional Amerika Serikat dalam Masa U.S.-China Strategic and Economic Dialogue Tahun 2012 (2011-2014)*

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Kamis, 4 Januari 2018  
Dan dinyatakan **LULUS**

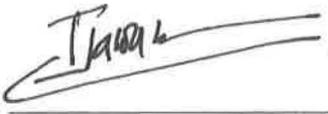
**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**  
Giandi Kartasasmita, S.IP., M.A.

: 

**Sekretaris**

Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A.

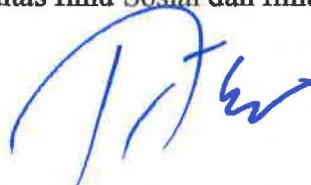
: 

**Anggota**

Dr. Aknolt Kristian Pakpahan

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bunga Putri Nauli  
NPM : 2014330125  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : *Unfair Treatment* China terhadap Perusahaan  
Multinasional Amerika Serikat dalam masa *U.S.-China  
Strategic and Economic Dialogue* Tahun 2012 (2011-  
2014)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 4 Januari 2018



Bunga Putri Nauli

## ABSTRAK

Nama : Bunga Putri Nauli

NPM : 2014330125

Judul : *Unfair Treatment* China terhadap Perusahaan Multinasional Amerika Serikat dalam Masa *U.S-China Strategic and Economic Dialogue* Tahun 2012 (2011-2014)

Pemerintah China dalam *U.S.-China Strategic and Economic Dialogue* bulan Mei 2012 berkomitmen untuk mengembangkan lingkungan persaingan dan perlakuan adil pada setiap perusahaan tanpa diskriminasi termasuk pada perusahaan asing. Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh persaingan yang tidak adil dari kebijakan pemerintah yang dianggap mendukung SOEs (*State Owned Enterprises*) di pasar China. Penelitian ini mencoba menggambarkan *U.S.-China Strategic and Economic Dialogue* dan signifikansi perubahan setelah kesepakatan. Penelitian ini mengambil pertanyaan riset sebagai berikut: “Bagaimana *Unfair Treatment* terhadap Perusahaan Multinasional AS pada masa *U.S.-China Strategic and Economic Dialogue* Tahun 2012?”

Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep. Pertama konsep MNC sebagai unit usaha melakukan ekspansi untuk mengejar keuntungan melintasi batas negara yang seharusnya diperlakukan non-diskriminatif. Kedua, *State Owned Enterprises* sebagai badan ekonomi yang asetnya dimiliki oleh negara. Ketiga, *Unfair Treatment* yaitu perlakuan yang tidak memberikan hal layak yang seharusnya suatu subjek dapatkan. Keempat, teori yang digunakan adalah *State Capitalism* bahwa pasar diorganisir oleh negara dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kelima, teori *Statisme* yakni negara memonopoli secara absah dalam teritorialnya. Keenam, proteksionisme yang menjelaskan regulasi beberapa negara yang mencoba untuk memanipulasi perdagangan internasional dengan tujuan untuk menguatkan industri domestik dari pasar global. Ketujuh, *Favoritism in State-Business Relations*. *Favoritism* menyebabkan inefisiensi dan ketidakadilan karena meningkatkan biaya, resiko, dan hambatan bagi investor. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif.

Penelitian ini menemukan bahwa terjadi inkonsistensi antara kesepakatan dengan praktek yang terjadi. Inkonsistensi dapat terlihat pada perlakuan untuk perusahaan Ford, Visa dan MasterCard, serta Qualcomm. Hal tersebut disebabkan dua faktor. Pertama, karena SASAC telah mengartikulasikan sejumlah industri yang penting bagi keamanan ekonomi dan nasional China dan mengindikasikan bahwa industri strategis ini akan tetap sepenuhnya atau sebagian besar berada di bawah kendali pemerintah. Kedua, perusahaan asing harus berkompetisi dengan para pemain di industri China dimana perusahaan China tersebut merupakan pemain utama di negaranya karena prinsip *national championship*.

**Keywords:** *Unfair Treatment, Perusahaan Asing, SOEs, U.S.-China Strategic and Economic Dialogue*

### **ABSTRACT**

Name : Bunga Putri Nauli

NPM : 2014330125

Title : *China's Unfair Treatment to US Multinational Corporations during U.S.-China's Strategic and Economic Dialogue 2012 (2011-2014)*

*On May 2012, China's Government on U.S.-China Strategic and Economic Dialogue committed to enhance the competitive sphere and fair treatment to any company without discrimination. The background of the deal is the unfair rivalry from the government's policy which considered supporting SOE's (State Owned Enterprises) in China's market. This research tried to described The U.S.-China Strategic and Economic dialogue and a significant shift after the deal. The research question is: "How unfair treatment to U.S Multinational Company in U.S.-China Strategic and Economic Dialogue on 2012?".*

*To answer the research question, researcher will be using some theories and concept. The first one is the concept of MNC that expanding their business unit to gain a profit across national borders that should be treated non-discriminatory. Second is State Owned Enterprises as an economic entity whose assets are owned by the state. Third, the idea of Unfair Treatment that does not provide the proper thing that a subject should get. Fourth is State Capitalism theory that explained about how market is organized by a state in order to gain a profit. Fifth, Statism Theory which state monopolie legitimately in their teritorial. Sixth is Protectionism which explained states regulation that tried to manipulate international trade in order to strengthen domestic market. Seventh, Favoritism in State-Business Relations. Favoritism caused inefficiency and injustice as it increases costs, risks, and constraints for investors. The research method used by researcher is qualitative method.*

*This research found out the inconsistency between the agreement and what really happened. Inconsistency can be seen by the treatment to Ford, Visa and MasterCard, and Qualcomm. This is caused by two factors. First because SASAC has articulated some industries that important to China's economic and national security and indicates that this strategic industry will remain fully or largely under the control of the government. Secondly, foreign companies must compete with players in the Chinese industry where the Chinese company is a major player in the country because of the principle of national championship.*

**Keywords:** *Unfair Treatment, Foreign Companies, SOEs, U.S.-China Strategic and Economic Dialogue*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat selesai tepat waktu. Penulis melakukan penelitian yang berjudul “*Unfair Treatment China terhadap Perusahaan Multinasional Amerika Serikat dalam masa U.S.-China Strategic and Economic Dialogue Tahun 2012 (2011-2014)*”. Adapun penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua penulis yang telah memberikan dukungan baik moril dan materiil. Penulis juga ingin berterima kasih kepada Mas Irawan selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberi arahan kepada penulis demi kelancaran dalam pengerjaan karya ilmiah ini. Rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam suka maupun duka. Kiranya tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Besar harapan penulis bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan adanya kritik serta saran dari para pembaca dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tolak ukur serta referensi bagi penelitian selanjutnya.

Bandung, 4 Januari 2018

Bunga Putri Nauli

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur sebesar-besarnya saya panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat yang diberikan baik selama proses pembelajaran hingga proses penyusunan karya ilmiah ini. Atas kesehatan yang diberikan terutama untuk dapat menyelesaikannya tepat waktu.

Kepada kedua orang tua penulis, H. M.B. Simatupang dan Hj. Euis Maryamah yang telah memberikan doa tiada henti-hentinya untuk kelancaran proses pembelajaran di masa kuliah hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Juga untuk dukungan moril dan materiil yang telah diberikan. Semoga bisa terus membahagiakan kedua orang tua saya.

Kepada Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., M.A. selaku dosen pembimbing yang selalu mendukung dan memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Mas Ir sukses dan sehat selalu. Juga kepada dosen-dosen HI UNPAR atas ilmu-ilmunya.

--

Teruntuk *Gray Area*, terimakasih untuk bahagia, tawa, sedih, pilu, yang jika dilalui bersama tidak seberat itu. Pesanku semoga lancar perkuliahan dan pekerjaan, percintaan, organisasi, dan sebagainya:

Hestherrilda Martha, kenal pertama kali saat ospek fakultas dan ternyata satu sekoci. Orang yang selalu menasehati karena di akhir perkuliahan ceritanya sesama itu. Tidak pernah terbayang untuk kenal teman *se-caring* ini. Aulia Revi, Jangan terlalu *workaholic* nanti ya, cintanya harus seimbang. Amara Maharani Bachtiar, sepemikiran dalam berbagai hal. Asiila Kamilia, halo snoopy yang tegas dan bijak. Febriyanthi Pingkan, orang tersantai yang pernah ada. Goodluck for *ldr-lyfe*. Kania

Ratnaningsih Rantawi, sang direktur perusahaan. Indira Junia Jauza teman yang sangat pandai impersonate orang.

Kaka-kakak dan keponakan-keponakan membuat rumah menjadi ramai saat membutuhkan tertawa ditengah penulisan skripsi ini.

Tiwi, Via, Dyah, Salma, Piki, Galih, Yunus, Evi, Haffy, Ira, Rasti, Ijah.

LKM INSPIRASI 16/17 terutama Ira, Kak Sarah, Kak Adi, Bayu, kabinet. Juga untuk keluarga Direktorat Jenderal Pengabdian Masyarakat, Kementerian Luar Negeri (rilda, renata, chaty, ellen, hao, louis, senal, cesy, paw, ininti, dan erwin). Bangga sekali dapat menjadi bagian di dalamnya plus TOSAYA dengan 114 staff. Terimakasih telah membuat TOSAYA ter-keren sepanjang masa!

Diplomasi Publik KEMLU khususnya geng-callingan malam yang berisi mahasiswa/i dari beragam kampus. Ellen, Venti, Opik, Bintang, Maria, Ama, Melinda, Audi, Panda, Rere, Panda, Ayu, Jaka, Elji, Arief. Sebelum skripsi bertemu orang-orang ini. Tidak menyangka akan sedekat ini, jika bisa ingin *extend* tetapi sudah masuk kuliah juga. Kangen rujak, pulang saling nungguin, *farewell* jika ada yang akan selesai magangnya. Sampai bertemu di sidang-sidang atau perwisudaan-perwisudaan kita ya.

Buat yang udah gak bareng tapi menemani selama enam tahun dari awal perkuliahan, bahkan SMA.

LISTRA UNPAR buat pengalamannya selama ada di kuliah. Terimakasih. Dan untuk kepanitiaan-kepanitiaan di kampus jingga.

**DAFTAR ISI**

ABSTRAK .....	i
<i>ABSTRACT</i> .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR DIAGRAM.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang Masalah.....	1
1.2    Identifikasi Masalah .....	7
1.3    Pembatasan Masalah .....	9
1.4    Rumusan Masalah .....	10
1.5    Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1.5.1    Tujuan Penelitian .....	10

1.5.2	Kegunaan Penelitian.....	11
1.6	Kajian Literatur .....	11
1.7	Kerangka Pemikiran.....	15
1.8	Metode Penelitian.....	28
1.9	Teknik Pengumpulan Data.....	29
1.10	Sistematika Pembahasan .....	29
BAB II.....		31
<i>STATE OWNED ENTERPRISES MEMILIKI POSISI KHAS DALAM REFORMASI</i>		
<i>KEBIJAKAN EKONOMI CHINA.....</i>		<i>31</i>
2.1	Struktur Ekonomi China.....	31
2.1.1	Reformasi Ekonomi Tahun 1978 .....	31
2.2	Kebijakan Pemerintah China terkait Ekonomi pada Tahun 2011-2014 (Hu Jintao & Xi Jinping) .....	33
2.3	<i>State Owned Enterprises</i> dan Perusahaan Asing di China.....	37
2.3.1	<i>State Owned Enterprises</i> di China .....	41
2.3.2	Perusahaan Asing di China .....	49
BAB III .....		57
DORONGAN KE ARAH LIBERALISASI EKONOMI US-CHINA: <i>U.S. – CHINA</i>		
<i>STRATEGIC AND ECONOMIC DIALOGUE</i> TAHUN 2012 .....		<i>57</i>
3.1	Pertemuan Kepala Negara AS dan China Sebelum Tahun 2012 .....	57
3.2	Latar Belakang dari Diselenggarakannya <i>U.S.-China Strategic and Economic</i> <i>Dialogue</i> .....	58
3.3	Jalur Bilateral Amerika Serikat dan China dalam <i>U.S.-China Strategic and</i> <i>Economic Dialogue</i> Tahun 2012.....	61

BAB IV .....	72
<i>UNFAIR TREATMENT</i> CHINA TERHADAP PERUSAHAAN AMERIKA SERIKAT .....	72
4.1 Perdagangan Amerika Serikat yang Senantiasa Defisit terhadap China... 72	
4.1.1 PDB China dari Tahun ke Tahun .....	75
4.1.2 Investasi Langsung Luar Negeri China.....	77
4.1.3 Defisit AS dengan China.....	78
4.2 Kebijakan Pemerintah China pada SOEs .....	81
4.3 Kebijakan Pemerintah China pada Perusahaan Asing .....	90
4.4 <i>Unfair Treatment</i> setelah <i>U.S.-China Strategic and Economic Dialogue</i> Tahun 2012 .....	98
4.4.1 Bidang Automotif: Ford, Perusahaan Multinasional asal Amerika Serikat .....	101
4.4.2 China UnionPay dengan Visa dan MasterCard.....	110
4.4.3 Perusahaan <i>Chipset</i> Amerika Serikat: Qualcomm .....	116
BAB V.....	122
KESIMPULAN.....	122
DAFTAR PUSTAKA .....	127

**DAFTAR DIAGRAM**

Diagram 2.1 SOEs dari Berbagai Negara dalam <i>Fortune Global 50</i> .....	43
Diagram 2.2 Struktur SASAC.....	46
Diagram 4.1 PDB China, Triwulan, Perubahan dari Tahun-ke-Tahun (dalam persen), 2008-2012.....	76
Diagram 4.2 Investasi Langsung Luar Negeri China.....	77
Diagram 4.3 Lembaga yang Mempengaruhi SOEs di China .....	86

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Sektor-sektor SOEs China.....	44
Gambar 2.2 Jumlah Pekerja SOEs China dari Tahun ke Tahun (dalam Juta)45	Gambar 2.3 Kerangka K
Gambar 2.4 Jumlah perusahaan asing di China terhitung dari tahun 2002-2014 (dalam ribuan) .....	50
Gambar 4.1 Struktur Kepemilikan Perusahaan ZTE .....	118

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 4.1	Defisit US dengan China.....	78
Grafik 4.2	Nilai Tahunan Investasi Langsung Luar Negeri antara AS dan China..	91
Grafik 4.3.....	Penjualan Ford di China dari Tahun 2012-2014	105
Grafik 4.4	.....Perdagangan <i>Auto Parts</i> US-China	107

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	..... Perdagangan Barang dengan Amerika Serikat Tahun 2011-2014	37
Tabel 2.2	Kategorisasi Perusahaan di China.....	39
Tabel 2.3	..... Batas Kepemilikan Sektor di China	50
Tabel 3.1	Partisipan <i>U.S.-China Strategic and Economic Dialogue</i> Tahun 2012 dari Amerika Serikat	
Tabel 3.2	.....Partisipan <i>U.S.-China Strategic and Economic Dialogue</i> Tahun 2012 dari China	64
Tabel 4.1	.....Peringkat 20 Bank Top Dunia (Maret 2012)	84
Tabel 4.2	List SOEs Bidang Automotif di China .....	101

## DAFTAR SINGKATAN

OECD : *Organisation for Economic Co-operation and Development*

PDB	: Produk Domestik Bruto
SASAC	: <i>State-owned Assets Supervision and Administration Commission</i>
SOBs	: <i>State Owned Banks</i>
SOEs	: <i>State Owned Enterprises</i>
<i>U.S.-China S&amp;ED</i>	: <i>U.S.-China Strategic and Economic Dialogue</i>
WTO	: World Trade Organization

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hubungan internasional berkaitan dengan aspek ideologi, politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan interaksi lainnya melalui aktor negara maupun non-negara berdasarkan kepentingan nasional. Kepentingan nasional merupakan landasan yang menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara terhadap sebuah isu tertentu. Tujuan dasar ilmu hubungan internasional adalah mengamati dan mempelajari perilaku internasional oleh aktor di dalam arena transaksi internasional. Perilaku yang dapat berwujud konflik, perang, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional serta dapat berwujud kerjasama.<sup>1</sup>

Terjadi sebuah kondisi saling ketergantungan dan kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional. Hubungan internasional menjadi lebih kompleks karena ambisi perusahaan-perusahaan untuk meraih keuntungan tidak hanya dari negara asalnya tetapi juga pada negara yang bertransformasi dari negara yang memiliki pengaruh kecil terhadap luar batas negara dan ekonomi global karena isolasionisme menjadi salah satu kekuatan utama yaitu China.<sup>2</sup> Luas negara China

---

<sup>1</sup> Anak Agung Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal.4-5.

<sup>2</sup> Bryan S. Turner, *The Routledge International Handbook of Globalization Studies*, (USA: British Library Catalogue, 2010), hal.42.

berjumlah 9,6 juta km<sup>2</sup> dengan penduduk berjumlah 1,37 miliar jiwa. Mulanya China hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap luar batas negaranya dan ekonomi global, kecuali terhadap negara yang telah memiliki hubungan politik yang dekat dengannya.<sup>3</sup>

Sebelum reformasi ekonomi yaitu pada masa kepemimpinan Mao, dilakukan program rekonstruksi dan industrialisasi dalam negeri sehingga perekonomian China pun hidup kembali. Dalam kepemimpinan Mao, timbul gagasan untuk ‘percaya pada diri sendiri’. Gagasan ini lalu berimplikasi pada level nasional maupun internasional yaitu setiap negara harus bersandar pada sumber daya sendiri demi mencapai tujuannya.<sup>4</sup>

Mao membawa China ke arah perubahan yang lebih baik pada sektor ekonomi. Mao melancarkan undang-undang pembaharuan agraria. Namun, reformasi tanah yang diluncurkan Mao mengalami kegagalan sehingga kemudian Mao mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum Partai Komunis China.<sup>5</sup> Deng Xiaoping pun menggantikan Mao. Ia menitikberatkan bahwa ekonomi sosialis yang dianut China adalah salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi China sehingga Deng Xiaoping memberlakukan reformasi ekonomi dan kebijakan terbuka bagi penanaman modal internasional secara konsisten

---

<sup>3</sup> “*China in Brief – Physical Geography*”, <http://china.org.cn/e-china/geography/index.htm>, diakses pada 28 Februari 2017.

<sup>4</sup> Friedrich. W. Y. Wu, “From Self-Reliance to Interdependence? Developmental Strategy and Foreign Economic Policy in Post Mao-China”, Vol.7 No.5 (1981).

<sup>5</sup> Changsheng Rong, “Analyzing the Teoretical System of Socialism with Chinese Characteristics”, vol.5 No.10 (Shihezi University, 2009).

walaupun sistem politik tetap menganut paham komunisme. Landasannya adalah melihat perkembangan China yang jauh tertinggal dari negara lain akibat politik pintu tertutup. Ia pun melakukan penggabungan antara ekonomi sosialisme dengan sisi positif kapitalisme. Kepemilikan publik adalah yang utama, perusahaan-perusahaan negara yang ada dikembangkan agar mendapatkan keuntungan dan berjalan seperti perusahaan swasta. Teori Deng Xiaoping kemudian dikenal dengan “*socialism with chinese characteristic*”.<sup>6</sup>

Kebijakan pintu terbuka ini penuh pertimbangan atas prakarsa politik dari pemerintah berdaulat serta didukung sebagian besar rakyat China. Rakyat menyadari bahwa modernisasi industri, penerapan metode pertanian yang maju, dan pembukaan hubungan dagang internasional merupakan satu-satunya jalan bagi China untuk menjadi negara modern dan makmur.<sup>7</sup> Hasil reformasi ekonomi yang dilakukan Deng Xiaoping ialah kebijakan ini berhasil mencapai target pertumbuhan ekonomi. Reformasi ekonomi membuat tabungan nasional China naik dari 96,5 milyar dollar AS menjadi 464,41 milyar dollar AS pada 1995. Produk Domestik Bruto China meningkat tahun 1979 yaitu pada 7,6% menjadi 14,2% pada 1992 dan 2007. Sekarang ini, PDB China berada hanya di bawah Amerika Serikat. Negara bekas isolasionis ini mulai memperlihatkan pada dunia untuk menjadi kekuatan ekonomi

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Yuan Wang, Rob Goodfellow & Xin Sheng Zhang, *Menembus Pasar Cina*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2000), hal.15.

global. Tentu saja hal ini memikat modal asing yang akan memperkuat perekonomian bangsa.<sup>8</sup>

Akan tetapi, tradisi yang dimiliki oleh masyarakat China membuat para investor asing harus menyesuaikan diri. Hingga abad ke-21, China menjadi negara yang menempuh jalan politik yang menjunjung tinggi kebutuhan domestik karena nasionalisme yang kuat. Ide seperti demokrasi tidak diadopsi karena dikhawatirkan mengandung bias yang tidak sesuai dengan ideologi yang dianut. Untuk menjadi negara modernisasi ekonomi-politik, China memilih jalan sendiri tidak memandang dan mengaplikasikan cara-cara yang dilakukan oleh negara barat untuk menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. China memegang ideologi dan rasa nasionalisme yang kuat. Pola ini disebut “*market capitalism without democracy*”.<sup>9</sup>

Di sisi lain, tantangan global dianggap penting dengan ekspansi perdagangan dan juga eksistensi ekonomi di mata internasional. Persepsi dan ideologi suatu negara sangat berperan dan berpengaruh terhadap hubungan luar negeri baik dalam konteks regional maupun global.<sup>10</sup> Pada bulan November 1995, China secara formal melakukan permohonan akses pada WTO. Hasilnya, China secara resmi menjadi anggota WTO ke-143 pada 11 Desember 2001. Ini menunjukkan tekad dan kepercayaan China untuk memperdalam reformasi dan pembukaan lebih jauh ke

---

<sup>8</sup> Amich Alhumami, “Modernisasi Ekonomi – Politik China”, [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=11216&coid=4&caid=33&gid=2](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=11216&coid=4&caid=33&gid=2) (diakses pada 2 Maret 2017).

<sup>9</sup> Kellee S. Tsai, *Capitalism without Democracy - The Private Sector in Contemporary China*, (London: Cornell University Press).

<sup>10</sup> Charles Bettelheim, “Economic Reform in China”, *The Journal of Development Studies*, Vol. 24, (1988).

dunia luar. Keuntungan yang diraih China setelah menjadi anggota WTO ialah menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua terbesar terkait PDB, eksportir barang dagangan terbesar, eksportir jasa komersial terbesar, dan tujuan pertama *foreign direct investment*.<sup>11</sup>

Memang, dengan begitu China telah memperluas perdagangan, mencapai reformasi ekonomi lebih lanjut, bahkan menarik tingkat investasi asing yang lebih tinggi dan mendorong supremasi hukum. Setelah memasuki WTO, China menikmati status *most favoured nations* (MFN) sebagai negara anggota yang memungkinkan China menikmati keuntungan dengan pembukaan pasar yang ditawarkan negara lain yang juga menyebabkan penghapusan praktek diskriminasi antar negara untuk mempromosikan perdagangan. Keanggotaan WTO mendorong tanggung jawab dan tantangan yang signifikan di China. Selain itu mendefinisikan ulang hubungan China dengan negara lain seperti dengan tetangganya di kawasan Asia dan terutama dengan Amerika Serikat yang pasar ekspornya paling signifikan. Pejabat pemerintah dan mereka yang mengikuti negosiasi mengetahui bahwa akses akan diikuti oleh reformasi besar dalam kebijakan ekonomi domestik juga sulitnya menerapkan beberapa akses terkait perubahan untuk memenuhi harapan mitra dagang China.<sup>12</sup>

Salah satu komitmen utama China dalam partisipasinya dalam WTO ialah China memperlakukan setiap anggota WTO secara setara. Semua individu dan entitas yang terlibat dalam investasi asing, termasuk perorangan dan entitas yang belum

---

<sup>11</sup> Permanent Mission of China to the WTO, "China in the WTO: Past, Present, and Future"

<sup>12</sup> Yuce Dural, "What Has Changed After the World Trade Organization Membership of China: Opportunities and Challenges", Agustus 2007

berinvestasi atau terdaftar di China, setidaknya akan menikmati perlakuan yang sama dengan perusahaan China mengenai hak-hak perdagangan.<sup>13</sup> China berjanji bahwa pemerintah tidak akan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung keputusan komersial terkait SOEs. Namun, tampaknya China tidak menjaga komitmen ini. Bagi perusahaan AS yang dapat mengembangkan perusahaannya China memang merupakan pasar yang menguntungkan tetapi pasar China merupakan pasar yang kurang ramah untuk menjalankan aktivitas bisnis.<sup>14</sup>

Dengan dilatarbelakangi permasalahan diatas, penulis memiliki faktor subjektif dan objektif dalam pemilihan penulisan penelitian ini. Faktor subjektif yang menjadi dasar penulis untuk membahas mengenai permasalahan yang telah disebutkan diatas adalah rasa keingintahuan dari penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlakuan yang tidak adil mengenai regulasi pada SOEs dan perusahaan asing yang merasa China tidak menjaga komitmen dalam posisinya sebagai anggota WTO untuk tidak mempengaruhi keputusan komersial terkait SOEs. Perusahaan asing merasa keterlibatan pemerintah memiliki dampak yang signifikan dalam menjalani aktivitas ekonomi khususnya yang terjadi antara *State Owned Enterprises* sebagai kekuatan domestik dengan MNC pada negara yang awalnya isolasionis lalu membuka pasarnya.

---

<sup>13</sup> He Yafei, "China's Entry into the WTO: Opportunities and Challenges", <http://www.china-embassy.org/eng/sgxx/sggg/sgggyth/t34795.htm> (diakses pada 10 Januari 2018)

<sup>14</sup> Szamoszegi, *China*.

Berbeda dengan faktor subjektif, faktor objektif menekankan pada masalah yang dijadikan penelitian yaitu masalah yang sesuai dengan studi hubungan internasional sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul “*Unfair Treatment China terhadap Perusahaan Multinasional Amerika Serikat dalam masa U.S.-China Strategic and Economic Dialogue Tahun 2012 (2011-2014).*”

## 1.2 Identifikasi Masalah

Prinsip perlakuan setara WTO mengharuskan pemerintah memberikan hak yang sama kepada semua perusahaan, tanpa mempedulikan perusahaan tersebut dimiliki oleh negara atau swasta. Semua perusahaan domestik, misalnya, akan dapat terlibat secara independen dan bebas dalam perdagangan luar negeri dalam waktu tiga tahun karena pembatasan operasi perdagangan luar negeri, kecuali perdagangan komoditas vital seperti minyak mentah, gandum dan tembakau, akan diangkat secara bertahap dalam periode tersebut.<sup>15</sup>

Dalam paragraf 46 dari Bagian II:6 (berjudul *State-Owned and State-Invested Enterprises*) dalam *Working Party Report*, perwakilan China mengkonfirmasi bahwa:

“China akan memastikan bahwa semua perusahaan milik pemerintah akan melakukan pembelian dan penjualan semata-mata atas pertimbangan komersial, misalnya harga, kualitas, kemampuan pemasaran, ketersediaan, dan bahwa perusahaan dari anggota WTO lainnya akan memiliki kesempatan yang memadai dalam bersaing untuk melakukan penjualan dan pembelian dengan persyaratan yang

---

<sup>15</sup> *WTO Entry Boosts China's Economy*, <http://www.china.org.cn/english/49058.htm>, (diakses pada 10 Januari 2018)

tidak diskriminatif. Selain itu, pemerintah China tidak akan mempengaruhi, secara langsung atau tidak langsung, keputusan komersial dari perusahaan milik negara termasuk jumlah, nilai, atau negara asal barang yang dibeli atau dijual, kecuali dengan cara yang sesuai dengan persetujuan WTO”.

Setelah satu dekade bergabung dengan WTO, salah satu tantangan di tingkat institusional adalah bahwa perusahaan selain SOEs tidak menikmati prinsip *national treatment* dibandingkan dengan SOEs sebagai prinsip yang menandakan perlakuan yang sama bagi orang asing dan penduduk lokal dengan setara. Kepeduliaan terhadap perlakuan yang adil ini menjadi pertanyaan terkait dengan tujuan akhir dari akses WTO yaitu membangun ekonomi berorientasi pasar ketika semua pelaku pasar dapat beroperasi dan bersaing dalam pijakan yang sama. Perekonomian harus berbasis aturan, bukan berbasis kepemilikan. Sejauh ini, posisi dominan SOEs sendiri disebut industri fundamental seperti pertahanan, pembangkit listrik, minyak dan kimia, telekomunikasi, batubara, penerbangan, perkapalan, manufaktur mesin, mobil, teknologi informasi, konstruksi, besi dan baja, logam, dan lain-lain.<sup>16</sup>

Eksklusivitas masuknya SOEs ke sektor-sektor terpilih dan regulasi-regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang membatasi penggunaan lahan merupakan dua hambatan kebijakan utama yang mencegah perusahaan lain untuk memiliki kesempatan yang sama dalam beroperasi. Perusahaan mengeluh dalam hal prosedur persetujuan dan akses terhadap pinjaman tak terkecuali pada perusahaan asing asal

---

<sup>16</sup> ICTSD Programme on Global Economic Policy and Institutions, “*A Decade in the WTO: Implications for China and Global Trade Governance*”

AS yang melakukan ekspansi ke China. Semangat non-diskriminasi WTO harus dilaksanakan di tingkat domestik. Bahkan dari sudut pandang ekonomi, perusahaan lain selain SOEs setidaknya sama pentingnya karena mereka membayar pajak, berinvestasi pada inovasi, dan menyediakan jutaan pekerjaan.

Langkah yang coba dilakukan China mengenai permasalahan yang terjadi, pemerintah China dalam *U.S.-China Strategic and Economic Dialogue* bulai Mei 2012 lalu berkomitmen untuk mengembangkan lingkungan persaingan dan perlakuan adil pada setiap perusahaan tanpa diskriminasi termasuk pada perusahaan asing. Namun, permasalahan muncul pada implemantasi dari dialog ini karena perusahaan asing merasa bahwa perlakuan tidak adil masih didapati saat melakukan aktivitas bisnisnya. Variabel dependen dari penelitian ini adalah perusahaan asing dengan variabel independen berupa kebijakan pada MNC dan SOEs yang dipengaruhi oleh keterlibatan pemerintah.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada aspek ekonomi yang dipengaruhi oleh politik untuk perkembangan perusahaan asing dan SOEs di China. Penulis membuat batasan tentang hal-hal yang akan diteliti dan menjadi faktor tinjauan penelitian dari segi wilayah, aktor, waktu, aspek, dan sudut pandang. Wilayah yang akan difokuskan adalah wilayah China sehingga aktor yang terlibat adalah pemerintah China serta komunitas bisnis asing AS yang berekspansi ke China, waktu diberlakukan tahun 2011-2014. Penelitian

dilakukan pada rentang tahun 2011 hingga 2014 dikarenakan pada tahun 2011 bertepatan dengan satu dekade China tergabung dalam keanggotaannya dengan WTO. Dalam laporan satu dekade China dalam WTO, ditemukan bahwa China belum memenuhi komitmennya terutama soal diskriminasi di tingkat institusional.

Penelitian ini berakhir di tahun 2014 saat *US Trade Representative* mengeluarkan laporan pada tahun 2014 Amerika Serikat bekerja keras untuk meningkatkan manfaat bagi pebisnis AS, penyediaan layanan dan konsumen perdagangan dengan China. Sepanjang tahun lalu, Amerika Serikat berfokus pada dialog berorientasi hasil dengan China, sementara juga mengambil langkah konkret untuk memberlakukan hak-hak AS di WTO sebagaimana mestinya saat dialog tidak menyelesaikan permasalahan bagi AS. Terkait aspek, aspek yang dijadikan penelitian adalah ekonomi khususnya pada sektor SOEs. Mengenai sudut pandang, dilihat dari sudut pandang perusahaan multinasional Amerika Serikat.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dikemukakan untuk menjadi pertanyaan penelitian adalah “Bagaimana *Unfair Treatment* China terhadap Perusahaan Multinasional AS pada masa *U.S.-China Strategic and Economic Dialogue* Tahun 2012?”

#### **1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pemerintah China yang dianggap dilakukan kepada perusahaan

multinasional Amerika Serikat pada masa *U.S. – China Strategic and Economic Dialogue* tahun 2012 yaitu pada tahun 2011-2014. SOEs di China yang membuat komunitas bisnis dari negara lain yang merasa mengalami perlakuan diskriminasi oleh China yang dianggap memberikan perlakuan istimewa pada SOEs China.

### **1.5.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan untuk para pembaca serta menjadi salah satu bahan referensi bagi penstudi tertentu maupun para penstudi dari bidang ilmu lain yang tertarik untuk mengkaji perusahaan asing di China ataupun memberikan gambaran penelitian mengenai perekonomian China, keterlibatan pemerintah di dalamnya, serta SOEs di dalam China.

## **1.6 Kajian Literatur**

Penulis memiliki beberapa literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pertama, buku *The Political Logic of Economic Reform in China* oleh Susan L. Shirk. Dalam buku ini dijelaskan kesuksesan ekonomi China. Kesuksesan ekonomi merupakan hal yang mengejutkan karena biasanya institusi politik yang komunis bersifat rigid dan tertutup terhadap perubahan akan mempertahankan kepentingan dengan melakukan *blocking* reformasi pasar. Nyatanya, sistem politik komunis China memiliki fleksibilitas dan otoritas yang menawarkan kesempatan untuk inovasi kebijakan. Reformasi ekonomi China tidak hanya sekedar sebagai *trial-and-error* dari pemimpin China untuk menemukan formula yang berhasil sebagai

refleksi dari debat diantara para ekonomi. Tantangan terbesar dari reformasi ekonomi yang didapat adalah dari sisi politik. Dibawah kepemimpinan Mao Zedong, China memiliki arah pada kepercayaan diri, melakukan perdagangan internasional hanya untuk mengisi kekurangan domestik dalam komoditas penting. Berbeda dengan Mao, era Deng Xiaoping menegaskan bahwa tidak ada negara yang memperoleh modernisasi dengan “*closed door-ism*”. China harus mengikuti ekonomi global, keputusannya untuk memperluas perdagangan luar negeri pada tahun 1979 dan memperbolehkan perusahaan luar negeri untuk berinvestasi di China. Hasilnya perekonomian China tumbuh dengan cepat.<sup>17</sup>

Kedua, dengan judul *Economic reform and growth in China* oleh Gregory C. Chow pada tahun 2002. Jurnal ini menjelaskan alasan China melakukan reformasi ekonomi pada tahun 1978, komponen reformasi ekonomi, karakteristik proses reformasi, alasan kesuksesan reformasi, faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, prospek dari reformasi dan pertumbuhan. Perubahan kelembagaan terkait dengan SOEs pun dilakukan. Pertama, memberikan otonomi terhadap SOEs dalam produksi, pemasaran, dan keputusan investasi. Kedua, kemandirian secara finansial atas keuntungan yang didapat setelah membayar pajak ke negara. Ketiga, memperkenalkan sistem tanggung jawab berdasarkan keputusan komite sentral partai komunis pada tahun 1984 untuk menjaga keuntungan yang

---

<sup>17</sup> Susan L. Shirk, *The Political Logic of Economic Reform in China*, (Berkeley: University of California Press, 1993).

tersisa. Muncul beberapa masalah yang terjadi di bawah reformasi diantaranya kurangnya manajemen yang berkualitas.<sup>18</sup>

Jurnal ketiga oleh Alvaro Cuervo Cazorra yang berjudul *Government as Owners: State-Owned Multinational Companies*. Keberadaan SOEs didasarkan atas faktor ekonomi sebagai solusi dari pasar dalam negeri untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua, dengan memperhatikan faktor politik yang berfokus pada strategi politik dan ideologi dari negara yang dianut. Kepemilikan berdasarkan pemerintah dapat menjadi sumber kerugian perusahaan-perusahaan internasional karena *host country* mendiskriminasi atas dasar nasionalistik. Ideologi politik suatu negara berpengaruh terhadap peranan SOEs dalam suatu negara. Pertama, ekonomi berdasarkan ideologi komunis. Dalam ekonomi ini, masyarakat sebagai pemilik perusahaan dan negara menjadi pemilik *de facto* yang mengatasnamakan masyarakat untuk memiliki perusahaan tersebut.<sup>19</sup> Kedua, ekonomi berdasarkan ideologi nasionalis. Berdasarkan ideologi ini, SOEs dibuat pemerintah untuk keperluan pembangunan negara sebagai ketidakmampuan dari perusahaan privat untuk melakukannya. Ketiga, ekonomi berdasarkan ideologi sosial yang melandaskan pada kebutuhan pemerintah dalam melakukan investasi di SOEs untuk memfasilitasi kebutuhan sosial seperti pendidikan, kesehatan atau pengurangan kemiskinan.

---

<sup>18</sup> Gregory C. Chow, "Economic Reform and Growth in China", (USA: Princeton University, 2004), hal. 130-131.

<sup>19</sup> Alvaro Cuervo Cazorra, *Government as Owners: State-Owned Multinational Companies*, (USA: Northeastern University, 2014).

Keempat, ekonomi berlandaskan ideologi strategi berfokus pada strategi negara untuk pembentukan SOEs seperti pertahanan.<sup>20</sup>

*A Chinese State Enterprise Under the Reforms: What Model of Capitalism* oleh Anita Chan dan Jonathan Unger menjadi jurnal keempat yang mendasari penulisan penelitian. Reformasi mendasari perusahaan untuk memperoleh profit dan memberikan pertimbangan yang lebih baik kepada manajemen dalam bagaimana menghabiskan biaya. Perusahaan berhubungan dengan bank yang bertanggungjawab terhadap kebutuhan finansial dan akan memonitor performa dari suatu perusahaan. Perusahaan melakukan beberapa langkah sebagai program nasional untuk melakukan restrukturisasi. Pertama, agar karyawan yang berusia lebih tua mengambil pensiun lebih dini. Kedua, sistem upah. Upah tidak lagi ditentukan oleh umur pekerja tetapi oleh jabatannya.<sup>21</sup>

Jurnal kelima, *Meeting the Challenge of Chinese Enterprise Reform* oleh Harry G. Broadman. Jurnal ini berisi mengenai inefisiensi yang masih terjadi pada SOEs sebagai inti dari sektor industri negara. Reformasi SOEs terus dilakukan termasuk '50-point program' yang diumumkan pemerintah pada November 1993 bahwa reformasi harus diperkenalkan. Terdapat tiga elemen yang menjadi sumber permasalahan di sektor industri China, yaitu sistem pemerintah, kebijakan dan rezim, dan kurangnya faktor dalam perkembangan pasar yang berjalan baik. Jurnal ini

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Anita Chan & Jonathan Unger, *A Chinese State Under the Reforms: What Model of Capitalism?*, *The China Journal*, No.62, (2009).

mendasari penelitian penulisan yang berfokus pada keterlibatan pemerintah dalam SOEs di China.<sup>22</sup>

### **1.7 Kerangka Pemikiran**

Dalam teori hubungan internasional, perilaku antar aktor dapat terjadi melalui konflik, perang, pembentukan aliansi, kerjasama, serta interaksi dalam organisasi internasional. Salah satu elemen dalam hubungan internasional yaitu ekonomi mendasari terjadinya perilaku aktor-aktor tersebut. Hal ini dikarenakan prinsip saling ketergantungan ekonomi antar negara. Aktor-aktor yang berperan bukan hanya negara namun juga dapat melalui perusahaan asing yang melakukan ekspansi ke luar negaranya sehingga aturan hukum negara yang dituju mempengaruhi perkembangan perusahaan.<sup>23</sup> Negara merupakan perwujudan politik dan pasar merupakan perwujudan ekonomi. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan justru saling terkait. Negara menentukan peraturan yang mengatur perilaku ekonomi. Politik dan ekonomi tidak beroperasi secara independen satu sama lain. Negara didasarkan pada konsep teritorial, loyalitas, eksklusivitas, dan memiliki monopoli penggunaan kekuatan yang sah. Pasar didasarkan pada konsep integrasi fungsional dan saling ketergantungan antara pembeli dan penjual. Bagi negara, batas teritorial merupakan basis yang diperlukan untuk otonomi nasional dan kesatuan politik. Untuk pasar, menghapuskan semua hambatan politik dan hambatan lainnya terhadap pengoperasian mekanisme

---

<sup>22</sup> Harry G. Broadman, *Meeting the Challenge of Chinese Enterprise Reform*, (USA: The World Bank, 1995), hal.18-19.

<sup>23</sup> Turner, *Studies*.

harga sangat penting. Skripsi ini memaparkan hubungan antara negara dan pasar dalam hubungan internasional.<sup>24</sup>

### ***Multinational Corporations***

Pertama, penulis menggunakan konsep mengenai perusahaan multinasional menurut Colman dan Nixon. Karakteristik perusahaan multinasional adalah perolehan pendapatan yang dilakukan melampaui batas negara, perdagangan terjadi dalam lingkup perusahaan walaupun berada pada antar negara, terdapat kontrol teknologi yang digunakan dan modal, sistem manajemen dan distribusi mengalami pengembangan sehingga melintasi batas negara. Unit usaha melakukan pengejaran keuntungan dengan melakukan ekspansi ke luar negara. Jika perusahaan memperoleh keuntungan yang meningkat per tahunnya atau berada pada nilai yang tertahan pada angka-angka tertentu seperti angka tahun sebelumnya maka perusahaan dikatakan sehat, jika perusahaan menunjukkan perolehan keuntungan yang menurun maka dapat digolongkan bahwa perusahaan tersebut tidak lagi kompetitif.<sup>25</sup>

Terkait dengan peningkatan keuntungan, perusahaan multinasional melakukan ekspansi ke level internasional dengan meningkatkan daya saing internasional yang ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk peningkatan produktivitas. Berbeda dengan perusahaan lokal, perusahaan multinasional tidak dapat berlindung di bawah proteksi dari pemerintah setempat melainkan harus berpaku pada daya saing vis-à-vis

---

<sup>24</sup> Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, (New Jersey: Princeton University Press, 1987), hal 8-11.

<sup>25</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal. 117-121.

perusahaan lain. Bahkan, tekanan perusahaan multinasional muncul karena pemerintah negara yang dituju ataupun pelaku bisnis di negara yang dituju tidak mau disaingi dengan kehadiran perusahaan multinasional di negara mereka.<sup>26</sup>

### ***State Owned Enterprises***

*State Owned Enterprises* merupakan badan ekonomi yang asetnya dimiliki oleh negara. Reformasi ekonomi yang dilakukan Deng Xiaoping tidak serta merta diikuti oleh reformasi SOEs. Deng Xiaoping menunda reformasi sektor perkotaan, termasuk reformasi SOEs, sampai tahun 1984 ketika keberhasilan reformasi sektor pedesaan yang besar memberikan kepercayaan yang cukup dan fondasi ekonomi yang solid untuk mendorong reformasi ke tingkat yang lebih tinggi. Efisiensi SOEs yang stagnan mendukung pandangan pesimis barat terhadap SOEs. Pertumbuhan produktivitas SOEs berangsur turun jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki bentuk kepemilikan lain. Saat reformasi industri dimulai pada pertengahan tahun 1980 an, tingkat efisiensi SOEs mulai mandek, pertumbuhan produktivitasnya mencapai nol atau negatif. Faktor yang menyebabkannya adalah kurangnya insentif dan beban kerja yang berat cenderung dipaksakan. Faktor produktivitas memiliki kesesuaian dengan kemajuan teknologi atau efisiensi, kemampuan untuk berinovasi.

---

<sup>26</sup> Ibid.

Industri non-SOEs memiliki kemajuan teknologi yang tinggi. Namun, sesuai dengan pendekatan pragmatis dan strategisnya.<sup>27</sup>

Reformasi sebelum tahun 2003 dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dari tahun 1979 hingga 1992 di bawah Deng Xiaoping. Pada tahap pertama, penekanan reformasi adalah pada *enterprization* yaitu mengubah SOEs dari organisasi afiliasi pemerintah dibawah ekonomi terpusat menjadi perusahaan otonom dan produktif di bawah komoditas ekonomi yang direncanakan. Dengan begitu, manajer perusahaan memperoleh lebih banyak kekuatan dan otonomi dengan tujuan termotivasi untuk meraih keuntungan. Manajer dapat menawar dengan negara untuk kondisi yang menguntungkan mereka. Tahap kedua dari tahun 1992 sampai 2002 di bawah kepemimpinan Jiang Zemin. Tujuan reformasi SOEs adalah mengubah SOEs menjadi perusahaan modern ditandai dengan hak kepemilikan yang jelas akan tanggung jawab dan wewenang. Selain itu, terjadi pemisahan fungsi pemerintahan dan perusahaan. Solusi utama adalah dengan merubah SOEs menjadi perusahaan pemegang saham. Solusi ini tidak berjalan baik. Pemerintah lalu menerapkan strategi mempertahankan SOEs besar dengan membantu dari kesulitan dan melepaskan SOEs kecil. Setelah Hu Jintao dan Wen Jiabao mengambil alih peran kepemimpinan pada tahun 2003, reformasi SOEs China memasuki tahap ketiga dengan pembentukan SASAC. Tema reformasi fase ini bisa disebut konsentrasi. Di bawah pengelolaan SASAC, SOEs China terkonsentrasi di beberapa industri strategis dan keluar dari daerah di mana

---

<sup>27</sup> Carsten Holz, *China's Industrial State-Owned Enterprises: Between Profitability and Bankruptcy*, (Singapore: World Scientific Publishing Co, 2003).

SOEs tidak memiliki daya saing. Kini, perusahaan milik negara memiliki kendali mutlak di tujuh industri: pertahanan, pembangkitan dan distribusi listrik, minyak bumi dan petrokimia, telekomunikasi, batubara, penerbangan sipil dan jalur air.<sup>28</sup>

### ***Unfair Treatment***

Perlakuan yang adil ataupun tidak adil didasarkan pada bagaimana subjek lain seperti mereka diperlakukan. Landasannya ialah membuat perbandingan sosial dengan orang lain yang juga berada pada posisi yang sama. Gagasan perlakuan yang tidak adil atau *unfair treatment* menurut Nicholas Rescher adalah masalah tidak memberikan hal yang layak seharusnya suatu subjek dapatkan.<sup>29</sup>

Bentuk *unfair treatment* diantaranya perlakuan antar pegawai karena beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, ras, etnis, warna kulit, asal negara, disabilitas secara mental ataupun fisik, informasi genetik, dan lainnya. Orang yang menghasilkan produk lebih baik entah karena dengan bekerja lebih keras atau dengan menjadi lebih berbakat seharusnya dibayar lebih untuk usaha mereka daripada seharusnya bagi orang yang menghasilkan upaya lebih sedikit.<sup>30</sup>

Bentuk lain *unfair treatment* yang terkait dengan penelitian ini adalah *unfair treatment* antar perusahaan. Perusahaan yang diberlakukan berdasarkan kepemilikan telah menyebabkan status hukum yang tidak setara untuk berbagai jenis perusahaan. Peraturan perpajakan yang tidak sama dan kebijakan preferensial telah menawarkan

---

<sup>28</sup> Xin Li & Kjeld Erik Brodsgaard, *SOE Reform in China: Past, Present, and Future*, hal 54-58.

<sup>29</sup> Michelle Maiese, "Principle of Justice and Fairness"

<sup>30</sup> M Sentiments, "7 Economics Behavior and Rationality"

lapangan pekerjaan yang tinggi untuk perusahaan jenis tertentu yang selanjutnya mengarah pada konflik.<sup>31</sup>

Struktur industri di bawah rezim sosialis paling tepat dianggap monopoli dengan hambatan masuk yang lebih sulit dan program subsidi untuk perusahaan dalam negeri. Perusahaan monopoli tidak perlu khawatir dengan persaingan dari calon pendatang dan keinginan konsumen. Pengembangan perusahaan dipromosikan untuk memperkenalkan persaingan di antara perusahaan-perusahaan dengan mengurangi hambatan masuk ke industri dan menghapus perlakuan tidak adil antara perusahaan negara dan perusahaan non-negara. Jelas bahwa pergantian struktur industri monopoli dengan struktur yang lebih kompetitif harus menjadi bagian integral dari reformasi ekonomi di China.<sup>32</sup>

Dampak dari *unfair treatment* adalah akan ada perbandingan dengan hal berbeda yang telah dialami sebelumnya oleh perusahaan dalam konteks yang sama seperti perlakuan negara lain dalam konteks penerimaan perusahaan asing serta mengevaluasi prosedur dengan membayangkan prosedur yang seharusnya terjadi. Subjek yang menunjukkan ketidakpuasan akan menunjukkan lebih banyak protes. Persepsi keadilan dapat mempengaruhi reaksi dan perubahan dalam hasil yang akan diraih. Dengan begitu, dari prosedur tersebut, bila dihadapkan pada prosedur yang tidak akurat dibandingkan dengan yang telah dialami sebelumnya akan menunjukkan

---

<sup>31</sup> Anthony Gar-on Yeh, *Developing a Competitive Pearl River Delta in South China Under One Country-Two System*, (Hongkong: Hongkong University Press, 2006), hal. 540.

<sup>32</sup> Keiji Otsuka, *Industrial Reform in China: Past Performance and Future Prospects*, (Oxford: Clarendon Press, 1998), hal.31.

pengaruh negatif dan niat untuk melakukan protes. Semakin banyak prosedur yang dinilai tidak tepat berbanding lurus dengan pengaruh yang lebih negatif dan niat protes akan ditunjukkan.<sup>33</sup>

### ***State Capitalism dan Statism***

*State Capitalism* dari Friedrich Engels yang menandai bahwa kapitalisme negara, berkontradiksi dengan globalisasi pada umumnya yang menjadi tak terelakkan. Pasar telah diorganisir oleh negara karena negara ingin mendapatkan keuntungan melalui perluasan market yang terjadi. Negara menyediakan sistem legal untuk menjamin hukum dan ketertiban. China merupakan negara yang tersentralisasi dan diatur oleh politisi yang secara aktif mempromosikan kepentingan ekonomi menggunakan kerangka ekonomi-politik. *State capitalism* juga memaksimalkan kontrol politik terhadap masyarakat dan ekonomi. China telah tumbuh sebagai hasil dari kapasitasnya dalam memproduksi dan mengekspor barang-barang ke pasar dunia. Pengembangan dalam ekonomi global ini menekankan peran negara dalam ekonomi global sehingga beberapa negara mulai melakukan perlindungan terhadap perekonomiannya dari perusahaan yang menjalankan usaha dan dana investasi yang beroperasi diluar batas negara.<sup>34</sup>

Definisi *state capitalism* dibedakan dalam dua varietas yaitu totaliter dan bentuk demokratis sebagai tatanan yang berbeda. (1). Pasar digulingkan dari

---

<sup>33</sup> Riel Vermunt, "The Effects of Unfair Procedure on Negative Affect and Protest", *Social Justice Research*, Vol.9, No.2, 1996.

<sup>34</sup> Turner, *Studies*, 60.

fungsinya untuk mengkoordinasikan produksi dan distribusi. Fungsi ini telah diambil alih oleh sebuah sistem yang mengontrol langsung. Kebebasan berdagang, perusahaan dan tenaga kerja tunduk pada campur tangan pemerintah sedemikian rupa, (2). Kontrol diberikan untuk mengatur dan memperluas produksi dan mengkoordinasikannya dengan konsumsi. Negara melanggar semua batasan yang ada, (3). Di bawah bentuk totalitarian, negara merupakan instrumen dari kelompok penguasa yang dihasilkan dari penggabungan kepentingan-kepentingan pribadi yang paling kuat dan tokoh terkemuka, (4). Di bawah pemerintah demokratis, negara memiliki fungsi pengendalian yang dikontrol oleh seseorang yang mencegah lembaga lain untuk menjadikannya sebagai instrumen kekuasaan.<sup>35</sup>

Penulis menggunakan teori statisme dari Ayn Rand. Dengan lahirnya negara modern, penggunaan kekuatan fisik mulai dibatasi negara. Negara diasumsikan “memonopoli penggunaan kekuatan fisik secara absah dalam teritorialnya”. Negara memiliki pengaruh terhadap aktivitas ekonomi sehingga mempengaruhi kekuatan pasar. Pengaturan politik adalah dasar fungsi pasar domestik dan internasional. Statisme mengacu pada keberlanjutan dan penguatan negara yang sebelumnya mengenyampingkan kebijakan ekonomi untuk tujuan politik. Menurut Statisme, negara harus mengendalikan kebijakan ekonomi atau sosial, atau keduanya, sampai tingkat tertentu. Negara komunis merupakan contohnya. Dalam ekonomi terbuka,

---

<sup>35</sup> Paul Piccone, *The Essential Frankfurt School Reader*, (New York: Continuum, 1990), hal. 71-74.

negara memperbolehkan suatu kelonggaran dalam memasarkan dan menetapkan harga barang.<sup>36</sup>

Maka, statisme merupakan suatu sistem yang memberikan kekuasaan yang tidak terbatas pada negara dengan anggapan individu akan mendukung keputusan-keputusan negara. Negara memiliki satu fungsi yaitu perlindungan terhadap hak-hak dari kekuatan fisik dan kecurangan. Negara mengendalikan perawatan medis, mengatur bisnis dengan teliti sehingga perusahaan harus mematuhi, mengendalikan jumlah uang beredar, mengatur penjualan inovasi medis, mengatur saham, menetapkan cadangan bank, mensubsidi pertanian, mengenakan tarif, memutuskan bisnis mana yang dapat bergabung maupun tidak, mengoperasikan sekolah dan universitas.<sup>37</sup>

### **Proteksionisme**

Keempat, proteksionisme. Tokoh yang berpengaruh dari ide proteksionisme adalah Alexander Hamilton.<sup>38</sup> Menurut pandangan kaum merkantilisme, ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan konteks politik. Sebab, ekonomi merupakan sarana meningkatkan kekuatan negara.<sup>39</sup> Regulasi beberapa negara yang mencoba untuk memanipulasi perdagangan internasional dengan tujuan untuk menguatkan industri

---

<sup>36</sup> David N. Balaam & Michael Vesseth, *Introduction to International Political Economy* 2<sup>nd</sup> Edition,, (New Jersey: Prentice Hall, 2001), hal.39.

<sup>37</sup> Harry Binswanger, "Statism: Whether Fascist or Communist, It's The Deadly Opposite of Capitalism", <https://www.forbes.com/sites/harrybinswanger/2013/11/13/statism/2/#7eb7f2a37f79>, (diakses pada 13 Desember 2017).

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid, 58.

domestik dari pasar global. Dengan kata lain, menekan impor dan mendorong negara untuk memperbesar ekspor. Manfaat yang diperoleh antara lain melindungi industri domestik yang baru berkembang agar dapat berkompetisi di pasar global, penduduk akan lebih memilih produk dalam negeri karena murah, industri dalam negeri mendapat waktu untuk beradaptasi jika lingkungan pasar berubah, lapangan kerja terlindungi, terjaga tingkat pertumbuhan ekonomi, terjaga stabilitas nilai tukar, dan melindungi kepentingan ekonomi nasional.<sup>40</sup> Menurut Alexander Hamilton (1755-1804) dalam “*Report on Manufacture*” (1791), dari 11 rekomendasi, terdapat poin yang relevan dengan isu perdagangan internasional yang dilakukan dalam studi kasus ini yaitu negara harus menerapkan *Protecting Duties* (tarif impor) atas kekhawatiran produk asing yang dapat ‘membunuh’ industri dalam negeri.<sup>41</sup>

Proteksionisme dapat dilakukan dengan meningkatkan *home market price* dari produk asing, menurunkan biaya produksi perusahaan domestik, atau membatasi akses dari perusahaan asing terhadap pasar domestik. Alasan utama dari proteksionisme adalah argumen dari pilihan publik. Kebijakan ini memang memberi keuntungan bagi beberapa kelompok sementara melukai yang lain. Pekerja dan pemilik sumber daya lain akan diuntungkan dari kebijakan ini. Walaupun konsumen dapat kehilangan kesempatan untuk memperoleh barang-barang khususnya yang

---

<sup>40</sup> Catatan Perkuliahan Ekonomi Politik Internasional Dr. Adelbertus Irawan Justiniarto Hartono, Drs., MA., *Proteksionisme*, 8 September 2015.

<sup>41</sup> Hadiwinata, *Internasional*.

bukan berasal dari domestik. Namun tentunya industri domestik akan diuntungkan dengan kebijakan ini.<sup>42</sup>

### ***Favoritism in state-business relations***

*Favoritism* menurut Markus Loewe, menyebabkan inefisiensi dan ketidakadilan dalam *state-business relation* karena meningkatkan biaya, resiko, dan hambatan bagi investor. Istilah *business climate* mencakup semua faktor yang membentuk keputusan baik pengusaha domestik maupun asing untuk melakukan ataupun tidak melakukan bisnis di suatu negara. Beberapa faktornya terkait dengan faktor yang tidak dapat diubah antara lain lokasi geografis, ukuran, morfologi, iklim, dan sumber daya alam negara. Faktor lain dapat berubah di luar kendali pemerintah. Contohnya adalah stabilitas politik dan pembangunan ekonomi negara tetangga. Berdasarkan *The World Development Report* pada tahun 2005, kualitas *business climate* bergantung pada tiga aspek: (i). Biaya melakukan bisnis, (ii). Resiko melakukan bisnis, dan (iii). Hambatan terhadap persaingan usaha.

- Biaya tinggi membatasi pendapatan dari pebisnis. Ditambah lagi dengan kurangnya infrastruktur, kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap keuangan, pajak yang tinggi, dan prosedur administrasi yang memberatkan

---

<sup>42</sup> Cletus C. Coughlin, *Protectionist Trade Policies: A Survey of Theory, Evidence, and Rationale*, (Federal Reserve Bank of St. Louis, 1988).

- Resiko yang tinggi juga menjadi masalah karena kebanyakan pelaku bisnis memiliki jiwa *risk averter* atau pencegah resiko sehingga mereka cenderung menghindari resiko tinggi
- Hambatan persaingan yang tinggi menghalangi perusahaan utamanya perusahaan baru untuk memasuki pasar dan dengan demikian menguntungkan perusahaan yang sudah kuat.<sup>43</sup>

Dengan begitu, sangat penting untuk investor dalam mempertimbangkan tata pemerintahan yang baik bagi mereka atau *good governance*. *Good governance* dapat didefinisikan sebagai tradisi dimana otoritas di suatu negara dijalankan berdasarkan kebaikan bersama. Karena itu, *good governance* berkomitmen pada prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, legitimasi, efisiensi, transparansi, dan supremasi hukum. Kualitas pemerintahan tidak hanya mempengaruhi hubungan antar warga negara dengan pemerintah tetapi juga antara perusahaan privat dan negara. Termasuk tidak hanya prosedur administrasi seperti pendaftaran perusahaan baru, perizinan, perpajakan, penegakan kontrak, dan pengajuan tender, tetapi juga hubungan pada tingkat politik dimana pebisnis lama cenderung berpartisipasi lebih bahkan pada perumusan kebijakan sementara pemerintah mencoba menggunakan perusahaan besar untuk tujuan mereka sendiri.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Markus Loewe, *The Impact of Favouritism on the Business Climate*, (Germany: German Development Institute, 2007), hal. 17-18.

<sup>44</sup> Ibid.

Kriteria utama untuk kualitas hubungan negara-bisnis adalah efisiensi dan keadilan. Efisiensi mengurangi biaya yang harus dikeluarkan investor sementara keadilan yakni untuk membatasi resiko dalam melakukan bisnis.

- Efisiensi meminimalkan *input* yang dibutuhkan untuk *output* tertentu. Efisiensi terdiri dari waktu dan uang. Contohnya kecepatan, kemudahan, dan mudahnya prosedur administrasi.
- Keadilan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai tujuan tertentu. Salah satu hasil keadilan adalah persaingan yang efektif.

Kata *favoritism* memiliki dua arti yang berbeda. Pertama, kecenderungan untuk memilih satu orang atau kelompok atas orang lain. Kedua, perlakuan istimewa yang konkret terhadap orang yang memiliki hubungan pribadi seperti saudara, teman, tetangga maupun kerabat lainnya. Penulis menggunakan definisi pertama untuk dijadikan kerangka pemikiran. *Favoritism* berbahaya bagi *business climate* karena tidak dapat mencapai efisiensi dan keadilan. Terdapat tiga dampak yang dihasilkan dari *favoritism* yaitu dampak sosial, politik, dan ekonomi. Pertama, dampak sosial. Mereka yang kurang terintegrasi dengan baik akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk memperoleh akses sehingga mengurangi pengembangan bakat dan gagasan. Akibat munculnya pemikiran bahwa keberhasilan seseorang bergantung pada koneksi daripada usaha mereka. Kedua, dampak politiknya adalah *favoritism* hanya menguntungkan mereka yang terhubung dengan baik dan mendiskriminasikan yang lain. Dengan begitu, *favoritism* menyebabkan ketidakadilan dalam hubungan negara-

bisnis. Ketiga, dampak ekonomi pada seseorang atau perusahaan yang memiliki koneksi lebih baik cenderung menerima lisensi lebih cepat daripada yang lain. Bahkan mungkin keuntungan dari pengecualian pajak dapat diberikan. Dapat pula menerima informasi eksklusif yang memungkinkan mereka mengidentifikasi pasar di masa depan. Orang dengan koneksi baik juga cenderung memenangkan kontrak pemerintah bahkan saat mereka tidak mengajukan penawaran terbaik. Dengan begitu, dapat dikatakan *favoritism* justru menciptakan persaingan.<sup>45</sup>

## 1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ialah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna perilaku individu maupun kelompok yang dianggap sebagai permasalahan sosial atau manusia. Umumnya penelitian ini disusun dalam sebuah penelitian induktif mulai dari hal yang mendetil hingga ke suatu hal yang lebih umum dengan berfokus pada makna individual dan kemudian peneliti menginterpretasi data.<sup>46</sup> Metode kualitatif bergantung pada analisis yang dilakukan dan pengetahuan dari konteks sosial dari pengumpulan data.<sup>47</sup> Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang melakukan observasi dan dokumentasi mendetil mengenai suatu

---

<sup>45</sup> Loewe, Institute, 19-27.

<sup>46</sup> John. W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative & Mixed Method Approaches*, (California: SAGE Publications, 2013), hal.4.

<sup>47</sup> Anol Bhattecherjee, *Social Science Research: Principle, Methods, and Practices*, (USA: University of South Florida, 2012), hal.113.

fenomena. Dalam jenis penelitian ini biasanya meliputi pertanyaan mengenai apa, kapan, dan di mana fenomena yang diteliti tersebut terjadi.<sup>48</sup>

### **1.9 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data sekunder seperti buku, jurnal, laman web, laporan untuk kemudian melakukan analisis dan menyimpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>49</sup>

### **1.10 Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penulisan ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

## **BAB I – PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, kajian literatur, pertanyaan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mengawali penelitian.

## **BAB II – STATE OWNED ENTERPRISES MEMILIKI POSISI KHAS DALAM REFORMASI KEBIJAKAN EKONOMI CHINA**

Pembukaan Investasi di masa Deng Xiaoping, Kebijakan Pemerintah China pada tahun 2011 dan 2014, serta membahas mengenai *State Owned Enterprises (SOEs)* dan perusahaan asing di China.

---

<sup>48</sup> Bhattecherjee, *Practices*, 6.

<sup>49</sup> Kenneth P. Bailey, *Methods of Social Research 3<sup>rd</sup> Edition*, (New York: The Free Press, 1994). hal.296.

**BAB III – DORONGAN KE ARAH LIBERALISASI EKONOMI US-CHINA:  
*U.S. – CHINA STRATEGIC AND ECONOMIC DIALOGUE* TAHUN 2012.**

*U.S.-China Strategic and Economic Dialogue* tahun 2012 meliputi perkembangan hingga lima poin hasil dari terselenggaranya U.S. – China S&ED keempat ini.

**BAB IV - *UNFAIR TREATMENT* CHINA TERHADAP PERUSAHAAN  
AMERIKA SERIKAT.**

*Unfair Treatment* pada perusahaan MNC AS di China. Dalam bagian ini penulis akan mengulas sistem kebijakan yang diberikan pemerintah pada SOEs. Selain itu membahas mengenai perbedaannya dengan perusahaan multinasional AS. Serta penulis menjelaskan argumen disertai dengan contoh kasus yang dialami perusahaan AS.

**BAB V - KESIMPULAN**

Bab ini menjadi penutup dari keseluruhan tulisan dengan menyimpulkannya serta melakukan kritik yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang terlibat.